



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

2026

Jl. Jend. Sudirman No.12,
Melayu, Kec. Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur 75512

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang amanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Undang- undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk jangka waktu Itahun. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang dimana untuk program,kegiatan serta sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkdatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran pejabat beserta staf di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tenggarong, Oktober 2025

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	54
BAB VPENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan program DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 - 2026.

RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPPKB untuk tahun kelima periode RENSTRA DPPKB 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKB Tahun 2026 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang di selaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan RENJA DPPKB Tahun 2026 mengacu ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada RENSTRA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 tentang TENTANG PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 Pembahasan Rancangan RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Forum OPD DPPKB untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara tahun 2026 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan RENJA dan arah garis kebijakan terkait yang dirumuskan antara lain:

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraJangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud Pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1. Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja program/kegiatan pada tahun **2024** secara keseluruhan capaian fisik rata-rata 96,6% dan realisasi keuangan rata-rata **86,2%**.

Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** Realisasi Anggaran Fisik sebesar 100 %.
2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar 100 %.
3. **Program Pengendalian Penduduk** Realisasi Anggaran Fisik sebesar 91,3 %
4. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar 94,0 %.

Untuk rekapitulasi capaian sebagaimana dalam Tabel T-29.

Penjelasan Analisis Keuangan

Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan program/kegiatan pada tahun **2024** secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang **dikelola** sebesar **Rp.34.505.040.734,00** di **realisasikan** sebesar **Rp.29.745.372.305,00**

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target anggaran sebesar **Rp.12.586.475.734,00** terealisasi sebesar **Rp 10.490.836.057,00** atau tercapai sekitar 83,4 %.
2. **Program Pengendalian Penduduk** dengan target anggaran sebesar **Rp. 4.273.6701.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.672.498.148,00** atau sekitar 85,9%.
3. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan target anggaran sebesar **Rp.10.473.414.000,00** terealisasi sebesar **Rp.8.880.592.960,00** atau sekitar 84,8%.
4. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan target anggaran sebesar **Rp.7.171.450.000,00** terealisasi sebesar **Rp.6.701.445.140,00** atau sekitar 93,4 %.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKB dan Pencapaian RENSTRA DPPKB s/d Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program kegiatan (Renja-PD) tahun 2024	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.1	Pertencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.1.1	Penyusunan Dokumen Pertencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	105,10	105,10	80,18	105,10	100,00	80,18	253,30	3,60
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,60	3,60
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pertencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	57,00	137,00	0,60
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pertencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	200,00	-	40	40	100,00	40	80,00	0,40
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Utama Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	100,00	20,00	20	20	100,00	20	60,00	0,60
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.2.1	Penyediaan Saluran Tunjangan ASN	Jumlah Laporan administratif keuangan perangkat daerah yang akurat	200,00	40,00	59,00	40,00	70,18	40,00	120,00	0,60
1.2.2	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SIP	Jumlah waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	3,00	1,00	3,00	100,00	1,00	3,00	0,60
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,10
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	5,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	5,00	1,00

1.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulang tidak daerah pada perangkat daerah	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
1.1.1	Rekonsiliasi dan Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Sediakan	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
1.1.2	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di lakukan Penatausahaan	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
1.4	Administrasi Kepengawasan Petinggiat Daerah	Jumlah ASH	340,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	1,00	337,00	0,40
1.4.1	Pengadaan Bahan Baku Daerah Airbus Keletgkangan	Jumlah Pakuan Binas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Kelebihan Tokus Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASH yang Mengikuti Rundingan Tokus	70,00	20,00	-	-	-	-	-	20,00	0,20
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	42	42	100,00	238,10	42	242,00	2,42
1.5.1	Pengadaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah jenis Perawatan dan Peningkatan Kantor yang di lakukan	150,00	30,00	30	30	30,00	100,00	30	90,00	0,60
1.5.2	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang di sediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,60
1.5.3	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	134.310,00	225,00	26,062	26,062	26,062,00	100,00	26,062	53.940,00	0,4037
1.5.4	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku	2.200,00	90,00	90	90	440,00	47,00	90	2.300,00	1,07
1.5.5	Pengadaan Bahan Baku Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Bahan Baku Koordinasi dan Komunikasi	750,00	150,00	170	170	150,00	80,24	170	450,00	0,60
1.5.6	Pengadaan Bahan Baku Logistik pada SKPD	Jumlah Bahan Baku Logistik	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penanjan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	135,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	0,00	0,51
1.6.1	Pengadaan Perawatan dan Mesin Listrik	Jumlah Perawatan Gedung Kantor	39,00	7,00	7	7	7,00	100,00	7	21,00	0,30
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Baku Penyelahan	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Kantor Prasarana gedung Kantor	75,00	30,00	30	30	30,00	100,00	30	90,00	1,20
1.7	Pengadaan Jasa Penanjan Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan jasa penanjan urusan pemerintahan daerah yang di lakukan	60,00	12,00	12	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
1.7.1	Pengadaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan Lain-lain	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan Lain-lain	60,00	12,00	12	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
1.7.2	Pengadaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	60,00	12,00	12	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
1.7.3	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,00	12,00	12	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60

3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penyakit dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tertahannya kegiatan individu dan KIE	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
3.1.1	Advokasi Program KB/KIE kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan KIE besar dan menengah	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
3.1.2	Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE) program KB/KIE sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana KIE	25,00	2,00	2,00	2,00	2,00	250,00	2,00	8,00	0,24
3.1.3	Pemilihan dan distribusi sarana KIE program KB/KIE	Jumlah sarana KIE	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
3.1.4	Peminatan KIE program KB/KIE melalui media cetak, elektronik dan elektronik dan media lain yang	Jumlah kegiatan Peminatan	20,00								
3.1.5	Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lain secara sistematis dan berkala	Jumlah Media	15,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,24
3.1.6	Pelaksanaan Workshop/Operasional Program KB/KIE melalui rapat koordinasi (Kadernasi) yang berorientasi pada (Kaderisasi) dan implementasi	Jumlah Peserta	540,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	324,00	0,60
3.1.7	Penggunaan operasional dan sarana/obat/pemilihan KB/KIE	Jumlah kegiatan di bidang penyuluhan KB	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	54,00	0,60
3.2	Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Potensi Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pelaksanaan peningkatan kapasitas KB	1185	237	237	237	237	100,00	237	474,00	0,40
3.2.1	Pembinaan BP dan program KB/KIE dan lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah BP yang di bina	1185	237	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
3.2.2	Pengadaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung	200	5	5	5	5	100,00	5	15,00	0,01
3.2.3	Penggunaan sarana penyuluhan/penggunaan pelayanan dan pengembangan program KB/KIE untuk petugas keluarga berorientasi (KB) untuk lapangan keluarga berorientasi PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	345	69	69	69	69	100,00	69	207,00	0,60
3.2.4	Penggunaan kader untuk masyarakat pedesaan (MPP)	Jumlah PPKB/PLKB	1185	237	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kesehatan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
3.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan pengorganisasian	Jumlah Fasilitas	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
3.3.2	Peningkatan kegiatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Apresiasi MKJP	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2.100,00	0,60
3.3.3	Pemilihan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00	5,00	11,00	0,74
3.3.4	Pelaksanaan Operasional Pelayanan KB Bergetas	Jumlah Apresiasi yang diterima	1.920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	320,00	2.240,00	1,17
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesenitiran Ber-KB	Calon PKB/PLKB / PKB yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan Kesenitiran Ber-KB	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	180,00	2,25
3.4.1	Penggunaan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja, termasuk dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesenitiran Ber-KB	Jumlah Organisasi dan Mitra Kerja	300,00	30	30	30	30	100,00	30,00	114,00	0,60
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pembinaan Kampung KB Berbasis Data	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
3.4.3	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KB/KIE di Kampung KB	Jumlah Kampung KB berorientasi Data	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
4	PROGRAM PEMERIDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Calon anggota Bina Keluarga Ber-KB (BKB)	7348	65,34	65,34	65,34	65,34	100,00	65,34	195,93	0,03

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB sebagai organisasi perangkat daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel T-C.30												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
Kabupaten Kutai Kartanegara												
No	Indikator	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,25	85,40	85,55	86,70	85,25	85,40	85,55	86,70		
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		70,00	75,00	75,00	85,00	70,00	75,00	75,00	85,00		
7	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		35,00	40,00	45,00	50,00	35,00	40,00	45,00	50,00		
8	Tersedianya dokumen grand design kependudukan		-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-		
9	Angka Total Fertility Rate (TFR)		2,18	2,16	2,14	2,12	2,20	2,16	2,14	2,12		
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		77,19	77,20	77,22	77,25	77,19	77,20	77,22	77,25		
11	Cakupan Pelayanan KB Baru		15,15	15,17	15,20	15,23	15,15	15,17	15,20	15,23		
12	Menurunnya angka Drop Out (DO)		12,22	12,12	12,12	11,92	12,22	12,12	12,12	11,92		
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		11,50	11,00	10,50	10,00	11,50	11,00	10,50	10,00		
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		16,08	16,10	16,13	16,16	16,08	16,10	16,13	16,16		
15	Indek Pemangungan Keluarga		58,50	59,00	59,50	65,00	58,50	59,00	59,50	65,00		
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		3,00	5,00	7,00	9,00	3,00	5,00	7,00	9,00		
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		66,67	77,78	88,89	100,00	66,67	77,78	88,89	100,00		
18	Cakupan Keluarga Akseptor Yang Terlihat Dalam Kelompok Ketahanan Keluarga		4,10	4,15	4,20	4,25	4,10	4,15	4,20	4,25		
19	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri		60,82	64,65	70,26	73,18	60,82	64,65	70,26	73,18		
20	Cakupan Keluarga Anggota BKB Yang Ber-KB		67,25	69,78	71,31	73,48	67,25	69,78	71,31	73,48		
21	Cakupan Keluarga Anggota BKL Yang Ber-KB		58,15	59,36	61,32	64,63	58,15	59,36	61,32	64,63		
22	Cakupan Keluarga Anggota BKR Yang Ber-KB		76,13	80,93	84,98	91,97	76,13	80,93	84,98	91,97		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara regional dan nasional khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
- 2) Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Beberapa Permasalahan yang di hadapi oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan “mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing” yaitu:

- 1) Mempertahankan Angka Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,24 pada tahun 2024, dan ada beberapa faktor yang membuat TFR tinggi antara lain :
 - a. Akses pelayanan Keluarga Berencana yang terbatas.
 - b. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana media KIE.
 - d. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB

- 2) Belum optimal nya Basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan 8 (Delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB
- 2) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar stakeholder dalam program KKBPK
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga

Selanjut nya beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB
- 2) Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- 3) Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
- 4) Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
- 5) Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA)
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 8) Peningkatan promosi dan sosialisasi program KKBPK.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2026 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2026 serta prospek tahun 2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut :

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Program dan Kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan hasil penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMEN DAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada table di berikut ini.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Katanegara											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	Tagging
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggaring	1.1. Nilai SKRP Perangkat Daerah 2.1. Persentase Tindakan Lanjut Tindakan Hasil Audit BPK/Inspeksi 3.1. Persentase Kematangan Input RKP pada Aplikasi SKRP 4.1. Tingkat Kepuasan serta Kelengkapan LRAK per Tanggal 31 Maret 5.1. Tingkat Kepuasan LRAK per Tanggal 31 Maret 6.1. Produktif Tata Kelola Asap Perangkat Daerah	1.1. 85,10 2.1. 100 3.1. 100 4.1. 100 5.1. 100 6.1. 85	12.471.954.484,00	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggaring	1.1. Nilai SKRP Perangkat Daerah 2.1. Persentase Tindakan Lanjut Tindakan Hasil Audit BPK/Inspeksi 3.1. Persentase Kematangan Input RKP pada Aplikasi SKRP 4.1. Tingkat Kepuasan serta Kelengkapan LRAK per Tanggal 31 Maret 5.1. Tingkat Kepuasan LRAK per Tanggal 31 Maret 6.1. Produktif Tata Kelola Asap Perangkat Daerah	1.1. 85,10 2.1. 100 3.1. 100 4.1. 100 5.1. 100 6.1. 85	12.471.954.484,00	
1.1	Persentase, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggaring	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	516.000.000,00	Persentase, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggaring	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	516.000.000,00	
1.1.1	Persentase Dokumen Persetujuan Perangkat Daerah	Tenggaring	Jumlah Dokumen Persetujuan Perangkat Daerah	5,00	20.000.000,00	Persentase Dokumen Persetujuan Perangkat Daerah	Tenggaring	Jumlah Dokumen Persetujuan Perangkat Daerah	5,00	20.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40,00	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	40,00	30.000.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	40,00		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	40,00		
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan DPA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan DPA-SKPD	Tenggaring	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	20.000.000,00	

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja SKPD	46.500.000	12,00	46.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja SKPD	12,00	46.500.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	40,00	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	200.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	8.507.390.798,00	12,00	8.507.390.798,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12,00	8.507.390.798,00
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	0.217.390.700	14,00	0.217.390.700	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	14,00	0.217.390.700
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	15,00	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15,00	15.000.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	1,00	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	15.000.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000.000	60,00	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60,00	250.000.000
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	1,00	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	10.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	105.000.000,00	1,00	105.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1,00	105.000.000,00

1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	1,00	75.000.000		
1.3.2	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penyusunan	1,00	30.000.000		
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,00	410.040.000,00		
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat dan Keengkapannya	Tenggarong	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat dan Keengkapannya	100,00	360.040.000		
1.4.2	Pengadaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	50.000.000		
1.4.3		Tenggarong	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,00			
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	454.629.800,00		
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00	75.000.000		
1.5.2	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang diutamakan	4,00	75.000.000		
1.5.3	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tenggarong	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan yang diutamakan	225,00	19.095.800		

1.5.4	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	440	9.630.000	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	962,00	9.630.000		
1.5.5	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	130	200.000.000	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	130,00	200.000.000		
1.5.6	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	500	75.000.000	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	1,00	75.000.000		
1.5.7	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan			Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	4			
1.5.8	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan			Penyediaan Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	1,00			
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	23,00	175.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Tenggatong	Peralatan gedung Kantor, kelengkapan gedung kantor dan bangunan pagar	23,00	175.000.000,00		
1.6.1	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	15	50.000.000	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	14,00	50.000.000		
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan	15	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	1,00	75.000.000		
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggatong	Jumlah Bahan Bahan		50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggatong	Jumlah Dokumen Bahan dan Perawatan Perantara Permingkat-undangan yang Disiapkan	15,00	50.000.000,00		

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2.191.072.300,00	Penyediaan Jasa Penunjang U	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12,00	2.191.072.300,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	200.000.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempagaan Kantor	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempagaan Kantor	200.000.000	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempagaan Kantor	Tenggantung	Jumlah waktu penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempagaan Kantor	12,00	200.000.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelatihan Umum Kantor	Tenggantung	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Persekolahan Non PNS	1.791.032.300	Penyediaan Jasa Pelatihan Umum Kantor	Tenggantung	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Persekolahan Non PNS	12,00	1.791.032.300
1.8	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggantung	Jumlah Barang Milik Daerah	120.853.570,00	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggantung	Jumlah Barang Milik Daerah	171,00	120.853.570,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan	Tenggantung	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tenggantung	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	70.000.000
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggantung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	853.570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tenggantung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	125,00	853.570
1.8.3	Pembayaran/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggantung	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	50.000.000	Pembayaran/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggantung	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	3,00	50.000.000

2.1.5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program RKSP-K	Tenggarong	Pemerita Rapat	80	75.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program RKSP-K	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rapat, Pengendalian Program Bangsa-Romana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80,00	75.000.000		
2.1.6						Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengendalian Masyarakat tentang Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengendalian Masyarakat tentang Kependudukan	30			
2.1.7						Sosialisasi Tentang Pemantauan Kasus Demografi Kependudukan Bersama Model Solusi Strategi Selogal Peranginan Dini Danpapak Kependudukan Kepada Pemangku Kependidikan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Memiliki Entitasasi tentang Pemasokan Kajian Demografi Kependudukan Bersama Model Solusi Strategi Selogal Peranginan Dini Danpapak Kependidikan Kepada Pemangku Kependidikan	20			
2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Pemetaan perkiraan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	425.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	425.000.000,00		
2.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Data base	1	130.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Berwujud dan Pengolahan Data Kependudukan	1,00	130.000.000		
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Buku Profil	100	100.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1,00	100.000.000		
2.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	RK Yang Terdata	10.000	1.75.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Terselenggara	10.000	1.75.000.000		

2.2.6							Pemutatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20,00			
2.2.6							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengumpulan dan Laporan dan Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengumpulan dan Laporan dan Pelayanan KB	20,00			
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KIB)	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.057.000.000,00		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KIB)	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20		1.057.000.000,00	
			Angka Pemaknaan CTR Bagi Perempuan Miskah Usia 15-49 Tahun	77,15			Angka Pemaknaan CTR Bagi Perempuan Miskah Usia 15-49 Tahun		Angka Pemaknaan CTR Bagi Perempuan Miskah Usia 15-49 Tahun	77,15			
			Angka peserta KB Baru	15,13			Angka peserta KB Baru		Angka peserta KB Baru	15,13			
			Calon/pas F2S yang ingin ber-KB atau telah mempunyai (unmet need)	12,00			Calon/pas F2S yang ingin ber-KB atau telah mempunyai (unmet need)		Calon/pas F2S yang ingin ber-KB atau telah mempunyai (unmet need)	12,00			
			Pemanfaatan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05			Pemanfaatan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Pemanfaatan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05			
			Prevalensi angka Drop Out Abasiptor	12,32			Prevalensi angka Drop Out Abasiptor		Prevalensi angka Drop Out Abasiptor	12,32			
3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Terbaksennya kegiatan advokasi dan KIE	5,00	485.000.000,00		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan KIE			485.000.000,00	
3.1.1	Advokasi Program KIRPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Pengayaan Tim Besar dan Jambatan	5	200.000.000		Advokasi Program KIRPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendukung Advokasi Program Bangga Kersana (Prinsipnya Keluarga, Kepedulian, dan Kelangka Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10,00		200.000.000	

3.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Kartanegara	Jumlah Jenis Kegiatan KIE	2	75.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kemana (Pemberdayaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,00	75.000.000		
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik dan Media Luar Ruang	Kota Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kemana (Pemberdayaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	75.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Kartanegara	Jumlah Sarana KIE yang dimanfaatkan	5,00	75.000.000		
3.1.4	Penggunaan Media Masa Cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam penitran program KKBPk	Kota Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3	75.000.000	Penggunaan Media Masa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penitran Program KKBPk	Kota Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3,00	75.000.000		
3.1.5						Pengendalian Program KKBPk	Kota Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	1,00			
3.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KKBPk (PLKB)	Kota Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	172.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KKBPk (PLKB)	Kota Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	172.000.000,00		

3.2.1	Penyediaan Pelayanan Penyuluhan/ Penggerakan Masyarakat dan Pengembangan Program KKBPPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB		180.000.000	Penyediaan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Masyarakat dan Pengembangan Program KKBPPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPPK (Peningkatan Keluarga Berencana, dan Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas KB/PLKB	Rata Rata Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPPK (Peningkatan Keluarga Berencana, dan Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas KB/PLKB	30	100.000.000		
3.2.2	Penyediaan sarana pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung PKB/PLKB	40		Penyediaan sarana pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Rata Rata Kartanegara	30				
3.2.3	Pembinaan MP dan Program KKBPPK di Lin Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	69	22.000.000	Pembinaan MP dan Program KKBPPK di Lin Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan MP dan Program KKBPPK (Peningkatan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lin Lapangan oleh PKB/PLKB	Rata Rata Kartanegara	250		72.000.000		
3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kartanegara	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	60.00	225.000.000.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Kota Kartanegara	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Rata Rata Kartanegara	60.00		225.000.000.00		
	Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan KB	Kota Kartanegara	Jumlah Jenis Sarana Pendukung Pelayanan KB	3	75.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan KB	Kota Kartanegara	Jumlah Jenis Sarana Pendukung Pelayanan KB	Rata Rata Kartanegara	30		75.000.000		
3.3.1	Tridukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Kartanegara	Jumlah Aparatur Yang Dilayani	400	150.000.000	Tridukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Kartanegara	Jumlah Laporan Rutin Kegiatan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rata Rata Kartanegara	30.00		150.000.000		

3.3.3							Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Kartanegara	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45,00			
3.3.3							Penyediaan Dukungan Asuhan Kontrasepsi Beres dan Kegeluhan Pengeluaran MOP	Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Asuhan Kontrasepsi Serai dan Kegeluhan Pengeluaran MOP	5,00			
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Kartanegara	175.000.000,00				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Kartanegara			175.000.000,00		
3.4.1	Peningkatan Peran serta Organisasi dan Masyarakat Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Kartanegara	120.000.000	30			Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30	100.000.000		
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampong KB	Kota Kartanegara	75.000.000	40			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampong KB	Kota Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampong KB	40	75.000.000		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEHATERA (NS)	Kota Kartanegara	1.125.000.000,00	57,50			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEHATERA (NS)	Kota Kartanegara	Jumlah Peningkatan Keluarga	57,50	1.125.000.000,00		
				65,31			Cakupan anggota Rusa Keluarga Bahla (RUB)		Cakupan anggota Rusa Keluarga Bahla (RUB) ber-KB	65,31			
				72,97			Cakupan anggota Rusa Keluarga Remala (RUK)		Cakupan anggota Rusa Keluarga Remala (RUK) ber-KB	72,97			

4.1.2	Orbitasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orbitasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240	150.000.000	Orbitasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orbitasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.796,00	150.000.000		
4.1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Jumlah kelompok	344	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	344,00	300.000.000		
4.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	150	30.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	150,00	30.000.000		
4.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Jumlah kelompok-kelompok	3	25.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kata Kartanegara	Jumlah kelompok-kelompok	3,00	25.000.000		
4.1.6	Pengembangan Kegiatan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung tercapainya IPK	Kata Kartanegara	Dokumen Kegiatan	5	50.000.000	Pengembangan Kegiatan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kata Kartanegara	Dokumen Kegiatan	20,00	50.000.000		

4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Kartanegara	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50,00	350.000.000,00				
4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Operasional Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPPKS)	Kota Kartanegara	Jumlah kerjasama dengan mitra dari ormas	4	100.000.000		100.000.000		
4.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPPKS)	Kota Kartanegara	Jumlah peserta	40	150.000.000		150.000.000		
4.2.3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Kartanegara	Jumlah peserta	50	100.000.000		100.000.000		
			TOTAL		15.200.954.404,00			TOTAL	15.200.954.404,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan RENJA 2026 ini ada usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau program KKBPK, maka di perlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Strategis Kutai Kartanegara yaitu Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di selenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakan nya Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan psesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagai mana diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Sususan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA) di susun berdasarkan program yang terencana, terarah serta terukur yang di harapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan

Dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2026 merupakan tahun ke- 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 s/d 2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ada rencana aksi untuk mereview Dokumen RENSTRA Dinas sehingga akan terjadi Perubahan terhadap indikator sasaran RENSTRA. Hal ini penting mengingat RENSTRA merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijakan, program dan kegiatan RENSTRA SKPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 .Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026

Beberapa isu penting pembangunan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik ditingkat Nasional, Regional maupun ditingkat daerah di antaranya

Adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur ke hamilan sesuai dengan hak reproduksi.
- 2) Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi berbagai isu penting tersebut telah menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			
Misi: Terbaik dalam Mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan Sosial			
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatnya perencanaan kelahiran anak	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kependudukan	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
			Peningkatan Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)
			Peningkatan Akses dan Pelayanan KB Yang Merata dan Berkualitas
			Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BANGGA KENCANA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dan Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD) dan Nakes

Adapun indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang mengacu pada target RENSTRA 2025-2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	TARGET TAHUN						KE T
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera		Indeks Pembangunan Keluarga	68,10	69,20	70,20	71,20	72,10	73,00	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	78,50	82,70	85,40	87,10	88,20	88,80	

Selanjutnya program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan an pembangun an keluarga yang berkualitas dan sejahtera				Indeks Keluarga Pembangunan		
		Meningkatn ya kesejahtera an keluarga			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
			Terkendalin ya pertambah n jumlah penduduk		1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
				Terlaksananya pemaduan dan sinkronisasi program bangga kencana	Persentase Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana	Pemaduan Sinkronisasi Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah	dan Kebijakan Daerah dengan Daerah

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
						Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	
				Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Terhadap Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan pengendalian penduduk	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
				Terlaksananya Sistem Dini Peringatan Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Pelaksanaan Sistem Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi Kabupaten/Kota (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyuluhan Bangsa Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi	Advokasi Program Bangga kencana oleh	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)	
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Berencana/Petugas Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Berencana	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Sarana Penunjang Pelayanan KB	Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Kampung Berkualitas Keluarga		Kampung Berkualitas Keluarga	
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatn ya Pemberdaya an dan Peran serat masyarakat dalam mewujudka n keluarga sejahtera		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Pengasuhan Remaja		
					Indeks Lansia Berdaya		
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, serta Kelanjutusiaan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Mendukung iBangga Pembangunan Keluarga) Tersedianya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mendukung iBangga Pembangunan Keluarga) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Mendukung Tercapainya iBangga	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan Operasional Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Tersedianya biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Dibentuknya Kelompok dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi dalam Kemasyarakatan Pengerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi dalam Kemasyarakatan Pengerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pemantauan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, dan pendidik sebaya dan konselor sebaya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
			Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Penyusunan Perencanaan Daerah	Penyusunan Perencanaan Daerah	dalam Penyusunan Perencanaan Daerah	
				Tersusunnya Perencanaan Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Perencanaan Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Perencanaan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Jumlah Administrasi Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Administrasi Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Pencapai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di berikan kewenangan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang di sebabkan ada nya faktor penghambat.Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada table berikut:

PERMASALAHANPOKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kurangnya peran stakeholder dalam Program KKBPk	Belum optimalnya basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) antar stakeholder
	Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Kutai Kartanegara	Akses pelayanan yang kurang
		Kuantitas dan kualitas Tenaga penyuluh KB dan Petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal
		Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE
	Kurangnya pemberdayaan keluarga	Belum optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Ketahanan keluarga Belum terpenuhinya sarana Dan prasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan adanya PERMENDAGRIN Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Program pada Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 sebanyak **1 Program Generik dan 3 Program Teknis**. Dengan perincian dapat dilihat dari **Tabel** Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2026.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2026 adalah sebesar Rp. 15.200.954.484, -

TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pago Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pago Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2). Persentase Tindak Lanjut Pemuan Hasil Audit BPK/Inspekturat 3). Persentase Kelengkapan Input RUP pada Aplikasi SIRUP 4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per Tanggal 31 Maret 5). Tingkat Kelengkapan LHKASN per Tanggal 31 Maret 6). Predikat Tata Kelola Arasp Perangkat Daerah		11.85.44 23.184 73.193 4.1.103 53.199 63.75	12.468.954.484,00			11.85.44 23.184 73.193 4.1.103 53.199 63.75	12.468.954.484,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	177,00	510.000.000,00	APBD		177,00	510.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Statistik Regional	Jumlah Dokumen Statistik Regional	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,00					
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Regional	Jumlah Data Statistik Regional Daerah yang Telah Dibuat/Disajikan dan Diperiksa Laporan Pengantar Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,00					
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rangka Acuan Hasil Forum Perangkat Daerah Bertindakin Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,00					
1.1.1	Penguatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	5,00	200.000.000,00	APBD		6,00	200.000.000,00

1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	40.00	50.000.000,00	APBD	40.00	50.000.000,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	30.00	20.000.000,00	APBD	30.00	20.000.000,00
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	40.00		APBD	40.00	
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	30.00		APBD	30.00	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	12.00	40.000.000,00	APBD	12.00	40.000.000,00
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	40.00	200.000.000,00	APBD	40.00	200.000.000,00
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	11.00	8.507.390.798,00	APBD	11.00	8.507.390.798,00
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	12.00	8.217.340.798,00	APBD	12.00	8.217.340.798,00
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	1.00	15.000.000,00	APBD	1.00	15.000.000,00
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	40.00	15.000.000,00	APBD	40.00	15.000.000,00
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	1.00	250.000.000,00	APBD	1.00	250.000.000,00
1.2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	1.00	10.000.000,00	APBD	1.00	10.000.000,00
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab.Bata Karasangka Tenggaring	1.00	105.000.000,00	APBD	1.00	105.000.000,00

	Penyusunan Perencanaan Kelimahan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	1	75.000.000				75.000.000
	Koordinasi dan Pemdaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	2	30.000.000				30.000.000
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	40.00		APSD			
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu			APSD			
		Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu						
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	62.00	410.048.000.00	APSD			410.048.000.00
1.4.1	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	30.00	360.048.000.00	APSD			360.048.000.00
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	32.00		APSD			
1.4.2	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu		50.000.000.00	APSD			50.000.000.00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	30.00.00	449.629.000.00	APSD			449.629.000.00
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	100.00	75.000.000.00	APSD			75.000.000.00
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	100.00	70.000.000.00	APSD			70.000.000.00
1.5.3	Penyediaan Barang Jekatan dan Penggaji	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	1.00	19.999.800.00	APSD			19.999.800.00
1.5.4	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	30.00	9.630.000.00	APSD			9.630.000.00
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	11.00	200.000.000.00	APSD			200.000.000.00
1.5.6	Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu		75.000.000.00	APSD			75.000.000.00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	10.00	100.000.000.00	APSD			100.000.000.00
1.6.1	Dukungan, Dukungan dan Monev 1 tahun	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong-Melayu	10.00	50.000.000.00	APSD			50.000.000.00

1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	Sekeloa Kecamatan Tringreng	11.06		APBD		3.06	
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perengkapan sarana prasarana gedung kantor	Sekeloa Kecamatan Tringreng	11.06	50.000.000.00	APBD	50.000.000.00	3.06	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah waktu penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan.	Sekeloa Kecamatan Tringreng	11.06	2.191.037.008.00	APBD	*****	3.06	*****
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekeloa Kecamatan Tringreng	11.06	200.000.000.00	APBD	200.000.000.00	3.06	
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Sekeloa Kecamatan Tringreng	1.06	200.000.000.00	APBD	200.000.000.00	3.06	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Sekeloa Kecamatan Tringreng		1.791.037.508.00	APBD	*****		*****
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sekeloa Kecamatan Tringreng	1.06	195.853.578.00	APBD	195.853.578.00	3.06	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Sekeloa Kecamatan Tringreng	1.06	70.000.000.00	APBD	70.000.000.00	3.06	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Sekeloa Kecamatan Tringreng	1.06	75.853.578.00	APBD	75.853.578.00	3.06	

1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Kota Matangene	4.00	50.000.000,00	APBD	4.00	50.000.000,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		40.00	550.000.000,00		40.00	550.000.000,00
2.1	Penyusunan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	Kab. Matangene	1.00	125.000.000,00	APBD	1.00	125.000.000,00
2.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen grand design	Kab. Matangene	100.00		APBD	100.00	
2.1.2	Penguatan Kearsaas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kearsaas Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kab. Matangene	50.000.00	50.000.000,00	APBD	50.000.00	50.000.000,00
2.1.3	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isi Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	Kab. Matangene	44.00		APBD	44.00	
2.1.4	Pelaksanaan Rapat Peningkatan Program Bangga Beres	Jumlah Laporan Rapat Peningkatan Program Bangga Beres (Peningkatan Literasi, Kependudukan dan Keluarga)	Kab. Matangene		75.000.000,00	APBD		75.000.000,00

3.1.1	Advokasi Program Bangsa bersama oleh pihak advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Unitas Organisasi yang Menampung Advokasi Program Bangsa Kesuma (Pusat Pengembangan Edukasi, Kapasitas, dan Eksistensi Bangsa Kesuma) sebagai Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	260.000.000,00	APBD	260.000.000,00	260.000.000,00
3.1.2	Penyusunan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kesuma melalui Rapat Koordinasi Kemitraan (Bakormitra), Rapat Koordinasi Desa (BakorDesa), dan Mitra Lokakarya (MitraLok)	Unitas Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kesuma (Pengembangan Kemitraan, Koordinasi, dan Kemitraan Berbasis) Melalui Rapat Koordinasi Kemitraan (Bakormitra), Rapat Koordinasi Desa (BakorDesa), dan Mitra Lokakarya (MitraLok)	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat	75.000.000,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Unitas Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kesuma (Pengembangan Kemitraan, Koordinasi, dan Kemitraan Berbasis) Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	75.000.000,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00
3.1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB sesuai Kearifan Budaya LokalPromosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Unitas Komunikasi, Informasi dan	Kutai Kartanegara	75.000.000,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00

No	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ipartingnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ipartingnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ipartingnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ipartingnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ipartingnya
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB
3.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kekerabatan Ber-KB
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3.4.3	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Berkeadilan	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Berkeadilan	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Berkeadilan	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Berkeadilan	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Berkeadilan
3.4.4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
4.1	Calon anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
4.2	Calon anggota Bina Keluarga Berencana (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Berencana (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Berencana (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Berencana (BKB)	Calon anggota Bina Keluarga Berencana (BKB)

4.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga Apasiter UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana	Kutai Kartanegara	60.00	75.000.000.00	APBD	75.000.000.00
4.1.6	Penyeratan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen Kebijakan	Kutai Kartanegara		50.000.000.00	APBD	50.000.000.00
	Pembentukan kelompok dan Sosialisasi BMD, BMD Pusat Informasi dan Kewaspadaan Bencana (PKB-R) Rincin Keluarga Lintas (RKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apasiter (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok dibentuk dan Sosialisasi BMD, BMD Pusat Informasi dan Kewaspadaan Bencana (PKB-R) Rincin Keluarga Lintas (RKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apasiter (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kutai Kartanegara	5000			50.00
4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara		350.000.000.00	APBD	350.000.000.00
4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BER, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		Kutai Kartanegara	400	100.000.000.00	APBD	100.000.000.00

4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerta dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penguatan Operasional Pembiayaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK2, BKL, PPPKS, PIK-4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Isi: 1. Laporan Pendayagunaan Mitra Kerta dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penguatan Operasional Pembiayaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK2, BKL, PPPKS, PIK-4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Kartanegara	4,00	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
4.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penguatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK2, BKL, PPPKS, PIK-4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Isi: 1. Laporan Hasil Proses dan Solusi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerta	Kota Kartanegara	68,00	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
					15.200.954.484,00		15.200.954.484,00

- c. Angka unmetneed
 - d. Penggunaan MKJP
 - e. Persentase angka drop-out akseptor
- 3) Kurang nya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi OPD serta sarana prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - 4) Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa di bina oleh 1 orang PKB/PLKB.
 - 5) Percepatan Penurunan STUNTING di wilayah LOKUS STUNTING masih tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistic yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

C. Rencana tindak lanjut

Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu di tetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

